

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Bagian ini yang berisi tentang hasil yang berhubungan dengan Studi Fenomenologi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Di Kabupaten Gresik sebagai dasar untuk melengkapi teori yang ada.

Penelitian yang dilakukan Latif (2014) mengenai Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pengelolaan yang dipakai oleh pengurus masjid yaitu model pencatatan sederhana, yaitu mencatat aliran kas masuk dan aliran kas keluar lalu dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah saldo. Walaupun pencatatannya masih sederhana namun dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik dan tidak pernah ditemukan masalah. Walaupun Jama'ah sudah sangat percaya dengan para pengurus, namun dalam praktiknya para pengurus tetap bertanggungjawab (akuntabilitas) dengan apa yang dikerjakan dan terbuka (transparansi) dalam hal pencatatannya.

Penelitian Simanjuntak Dan Januarsih (2011) bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh para pengurus masjid. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. Dengan bentuk, empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pelaporannya tidak dilakukan secara konsisten dan periodik. Dengan konstruksi kebudayaan yang

unik di Masjid Baitusalam, sejati akuntansi dalam praktiknya mendorong transparansi dan akuntabilitas bergeser menjadi instrumen yang mendorong perilaku ibadah yang “ria”. Konstruksi kebudayaan masyarakat Ketapang dimana masjid Baitusalam berada, melahirkan “Dilema transparansi dan akuntabilitas”, yang menuntun pendekatan akuntansi yang khas dalam rangka mendorong perubahan konstruksi budaya tersebut untuk menjawab “Dilema transparansi dan akuntabilitas” yang hadir. *Clash Jurisdictional* tidak terjadi pada kasus Masjid Baitusalam, justru ustadz, agamawan yang mengelola masjid mendorong dan menginginkan kehadiran profesi akuntan untuk mendisain penggunaan akuntansi yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan masjid agar dapat membantu perbaikan kinerja masjid dalam melakukan peran-peran dakwah dan pembangunan konstruksi sosial ditengah masyarakat Islam. Namun, persepsi individu akuntan yang berpikir sebagai akuntan *mainstream* yang kebanyakan yang tertarik mengembangkan diri dan akuntansi pada domain entitas *mainstream* yakni entitas komersial menjadi *barrier* pengembangan akuntansi pada entitas akuntansi yakni masjid.

Endahwati (2014) Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pengelola BAZ Memaknai akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik

akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan.

Penelitian Kusdiyanto (2008) tentang Pengelolaan Dana Yayasan Pondok Pesantren Yatim Hajjah Patisah dengan tujuan penelitian (1) Untuk mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan berdasarkan sistem akuntansi keuangan yang modern; (2) Untuk mengetahui bagaimana PPYHP dalam menganggarkan keuangan secara tepat, sehingga tidak terjadi defisit keuangan; (3) Untuk mengetahui bagaimana PPYHP dalam menyusun laporan keuangan secara baik dan benar, sehingga secara akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hasil penelitian pengurus PPYHP dan para santri selama ini belum optimal dalam menjalankan fungsi pengelolaan dana. Yang selama ini mereka lakukan adalah, yayasan memperoleh dana dari beberapa donatur dicatat secara manual, sebagian disimpan di kantor yayasan untuk kebutuhan operasional sehari-hari(seperti untuk kebutuhan makan pengurus dan para santri, biaya sekolah para santri hingga SLTA, biaya listrik, telpon, PAM, gaji pembantu rumah tangga, dan lain-lain). Dari segi kelancaran acara, pembahasan materi pengelolaan dana ini cukup berhasil, dilihat dari ketertiban dan kelancaran acara dari awal hingga akhir, dan materi demi materi dapat disajikan secara tertib dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, termasuk kehadiran pemateri dan peserta. Selanjutnya, evaluasi kegiatan dilakukan secara langsung dengan melakukan tes (tanya jawab) antar peserta maupun antar peserta dengan pemateri (narasumber).

Penelitian yang dilakukan arifin (2014) bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan pondok pesantren Nazhatut Thullab. Selain itu, juga untuk mengetahui bagaimana pemahaman pengelolaan keuangan yayasan Nazhatut Thullab dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi. Hasil penelitian, Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan menganalisis laporan keuangan pondok pesantren yang dijadikan media akuntansi sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pondok pesantren Nazhatut Thullab di Prajjan Camplong Sampang Madura pada periode 2012, sehingga penulis menyimpulkan bahwa media akuntansi yang dihasilkan pondok pesantren Nazhatut Thullab yang digunakan dalam pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren adalah laporan keuangan yang hanya berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas. Pondok pesantren Nazhatut Thullab belum menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 tentang entitas nirlaba. Dalam menyusun laporan keuangan, Yayasan hanya menyajikan laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas, dimana pencatatan tersebut tidak sesuai dengan pos-pos pengklasifikasian yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku disebabkan karena Yayasan tidak mengenal standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman pelaporan keuangan bagi entitas nirlaba

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa pemahaman akuntabilitas jika dikaitkan dengan akuntansi merupakan bagian dari pelaporan akuntansi, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang terkait. Jika ditinjau dari teori keagenan, maka akuntabilitas melibatkan hubungan antara agen

dan *principal*, untuk mengurangi permasalahan yang terkait dengan kepentingan dari agen dan pihak-pihak yang terkait. Sayangnya tinjauan akuntabilitas hanya sebatas tatanan fisik, yang menjadikan akuntabilitas dalam bentuk laporan keuangan.

Selain itu juga didapatkan pengkayaan pemahaman mengenai akuntabilitas dalam konteks organisasi sosial keagamaan, maupun pemerintahan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dijalankan hanya menonjolkan sifat fisik yang menggunakan media laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan aspek mental yang terlihat dalam organisasi keagamaan, namun dalam penelitian tersebut belum nampak akuntabilitas yang memprioritaskan aspek spiritual, yang memang bersifat abstrak. Oleh karenanya dalam penelitian ini berusaha mengungkapkan akuntabilitas dalam pandangan akuntansi syariah.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Teori Akuntansi Syariah

Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipenuhi oleh manusia dalam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses

akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Wasilah dan Nurhayati, 2011:2).

Transaksi syariah berlandaskan pada prinsip pertama, prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dan saling tolong-menolong. Dalam transaksi syariah meliputi berbagai aspek, yaitu saling mengenal, memahami, menolong, menjamin, dan saling bersinergi. Kedua, prinsip keadilan (*'adalah*) artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak dan sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, dzulm, maysir, gharar, ihtikar, najasy, risywah, ta'alluq, dan penggunaan unsur haram dalam barang dan jasa, maupun dalam aktivitas operasi. Ketiga, kemaslahatan (*maslahah*); kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal (sesuai dengan syariah) dan thayyib (bermanfaat dan membawa kebaikan). Keempat, keseimbangan (*tawazun*) ; menekankan bahwa manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, melainkan pada pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Dan kelima, universal (*syumuliyah*) artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil 'alamin (Riza, dkk 2009:81-82) dalam (Putra, 2012).

2.2.2 Akuntansi Dan Teologi

Akuntansi adalah bagian dari ilmu dan praktik keduniawian yang terpisah dari kehidupan dan praktik maupun nilai keagamaan atau spiritual. (Laughlin, 1993) dalam (simanjuntak dan januarsih, 2011) ini hanyalah pemahaman para ilmuwan akuntansi yang memandang bahwa akuntansi adalah sebuah ilmu yang hanya diperuntukan untuk organisasi laba atau organisasi nirlaba yang terbebas dari pengaruh ilmu teologi atau ideologi tertentu.

Triyuwono (2000) menyatakan, akuntansi dibentuk oleh lingkungannya melalui interaksi sosial yang kompleks (*complicated sosial interaction*), namun mengutip sombart dalam Triyuwono (2000), ia dapat juga dapat berbalik mempengaruhi lingkungannya. Seperti yang disampaikan oleh Mathew dan Parera (1993) dalam Triyuwono (2000) menyatakan walaupun pandangan tradisional melihat bahwa akuntansi dibangun melalui interaksi sosial (*sosial constructed*) sebagai hasil dari kejadian sosial, ekonomi, dan politik, ini membuktikan bahwa akuntansi bukanlah suatu bentuk ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas nilai (*value free*), tetapi sebaliknya ia adalah disiplin dan praktik dan sangat sarat dengan nilai.

Triyuwono (2000) menyatakan konsep akuntansi yang mengedepankan *enterpirise theory* hanya memandang bahwa *income* yang diperoleh perusahaan merupakan hasil dari usaha kooperatif dari banyak partisipan (*stakeholders*). Oleh karena itu, *income* secara ideal didistribusikan kepada *stakeholders* atau konsep yang lebih luas menurut perspektif islam menghendaki *income* harus didistribusikan kepada *stakeholder* dan *universe*, hal ini tidak dapat dilakukan

oleh sifat egoisme seperti dalam *enterprise theory* tetapi dapat dilakukan apabila sifat *altruisme* atau mementingkan orang lain dari pada diri sendiri, dihadirkan dalam akuntansi seperti yang lazim berada dalam praktik teologi.

Akuntansi mainstream menurut Triyuwono (2000) sangat identik dengan angka-angka. Angka Adalah “pusat”, Tanpa angka, akuntansi menjadi sesuatu hal yang mustahil dan implikasinya adalah kita tidak dapat menggambarkan keadaan perusahaan atau entitas pelaporan lainnya. Mitologi angka-angka akuntansi yang juga ternyata merupakan sifat dari yang perlu di rekonstruksi, mengingat informasi kuantitatif tidak cukup memadai untuk memberikan gambaran yang relative lebih utuh tentang keadaan entitas pelaporan. Dengan kata lain, informasi kualitatif yang selama ini dimarginalkan, perlu diangkat dan diposisikan sejajar dengan informasi kuantitatif. .

2.2.3 Akuntabilitas Dan Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintah dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap :

1. sumber daya finansial
2. kpatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif
3. efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak

membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif (sadjarto, 2000). Tahap-tahap tersebut adalah :

1. *Probity And Legality Accountability*

Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).

2. *Proses accountability*

Dalam tahap ini digunakan proses, prosedur atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan (*planning, allocating and managing*).

3. *Performance accountability*

Pada tahap ini kegiatan dapat dinilai apakah sudah dilakukan dengan efisien (*efisien and economy*).

4. *Program accountability*

Tahap ini akan disoroti pada penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (*outcomes and effectiveness*).

5. *Policy accountability*

Tahap ini adalah tahap dalam pemilihan kebijakan yang akan diterapkan atau tidak pada kegiatan (*value*).

Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas ini yaitu :

1. Berfokus pada hasil (*outcomes*)

2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja
3. Menghasilkan sebuah informasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan.
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu
5. Secara teratur melaporkan hasil (*outcomes*) dan mempublikasikannya

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima untuk mengelola sumberdaya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang mempunyai kaitan dengan penggunaan sumber daya publik serta bertanggung jawab kepada pihak pemberi mandat (*prinsipal*). Akuntabilitas berbeda dengan konsep resposibilitas (Simanjuntak dan Januarsi, 2011).

Akuntablitas dapat dinilai sebagai salah satu elemen dalam responsibilitas. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang. Sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan member penilaian. Namun demikian, untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas *vertical* dan akuntabilitas *horizontal*. Akuntabilitas *vertical* adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas *horizontal* adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan. (Simanjuntak dan Januarsih, 2011).

Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), proses (*proses*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

1. *Input*, adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau aktivitas.
2. *Output*, adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. *Outcomes*, adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atas keluaran program atau aktivitas yang sudah dilaksanakan.
4. *Benefit*, adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.
5. *Impact*, adalah tolok ukur kinerja yang berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat. (Nuraini dan Indudewei, 2010).

2.2.4 Laporan Keuangan

Menurut Hanafi dan Halim (2002:63), dalam buku analisis laporan, laporan keuangan adalah laporan yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi

ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan.

Berdasarkan pendapat diatas maka laporan keuangan adalah tahap terakhir dalam proses / siklus akuntansi. Menurut nurhayati dan wasilah (2015;112) laporan keuangan lembaga amil zakat telah diatur dalam ED PSAK 101 (Revisi 2014) yang terdiri atas laporan Posisi Keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus-kas, dan catatan atas laporan keuangan.

- 1. Laporan Posisi Keuangan (neraca)** adalah suatu daftar yang menggambarkan aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh suatu entitas pada suatu saat tertentu (Jusup, 2012;27).
- 2. Laporan perubahan dana (laba-rugi)** adalah laporan yang disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, laporan laba-rugi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya (Jusup, 2012;30)
- 3. Laporan perubahan aset kelola (modal)**, hasil operasi perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap modal pemilik (disebut juga ekuitas pemilik). Apabila perusahaan memperoleh laba, maka laba tersebut akan menambah modal pemilik. Sebaliknya jika perusahaan menderita rugi, maka modal pemilik menjadi berkurang (Jusup, 2012;31).

4. **Laporan arus kas** adalah melaporkan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan perubahan bersih kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode yang dilaporkan (Jusup, 2011;409).
5. **Catatan atas laporan keuangan** adalah bagian dari laporan keuangan yang fungsinya melengkapi informasi nominal. Catatan atas laporan keuangan sangat penting kegunaannya dan bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan itu sendiri. (<https://www.akuntansionline.id>).

2.2.5 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Mulyadi (2001) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Menurut Nugroho Widjajanto (2001) Sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen.”

Menurut Wijayanto dalam Mardi (2011:4), Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai dokumen , alat komunikasi , tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Menurut Krismiaji (2002: 4 -5) sistem akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi

yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistem informasi akuntansi harus melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut:

1. mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke dalam sistem
2. memproses data transaksi
3. menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang
4. menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproses laporan, atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di komputer
5. mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya.

Menurut Husein (2004:5), tujuan dari setiap sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi akuntansi bagi berbagai pemakai/pengguna. Pemakai ini mungkin dari internal seperti manajer, atau dari eksternal seperti pelanggan.

menurut Mardi (2011:4), terdapat tiga tujuan SIA, sebagai berikut:

1. Guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada seseorang.
2. Setiap informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang berharga bagi pengambilan keputusan manajemen, sistem informasi menyediakan

informasi guna mendukung setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan sesuai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan.

3. Sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan sehari-hari. Sistem informasi menyediakan informasi bagi setiap satuan tugas dalam berbagai level manajemen, sehingga mereka dapat lebih produktif.

Menurut Hall (2001:197) prosedur penerimaan kas sebagai berikut:

1. Penerimaan Dokumen Cek dan informasi keuangan pendukung lainnya (nomor rekening pelanggan, nama pelanggan, nilai cek, dan sebagainya) tersedia pada saat bukti pembayaran diterima pada ruang penerimaan dokumen, dimana dokumen-dokumen tersebut dipilah-pilah. cek dikirimkan ke kasir pada departemen penerimaan tunai/kas, dan bukti pembayaran dikirimkan ke departemen piutang.
2. Kasir Cek diterima oleh kasir dan di catat pada jurnal penerimaan tunai/kas dan langsung disetorkan ke bank.
3. Bagian piutang bukti pembayaran yang diterima oleh departemen piutang digunakan untuk mengurangi saldo rekening pelanggan sebesar nilai pembayaran.
4. Departemen penerimaan kas dan piutang departemen penerimaan kas dan piutang mengirimkan ringkasan informasi tersebut ke departemen buku besar umum. Informasi dicocokkan dan digunakan untuk memperbarui rekening kontrol piutang dan rekening kas.

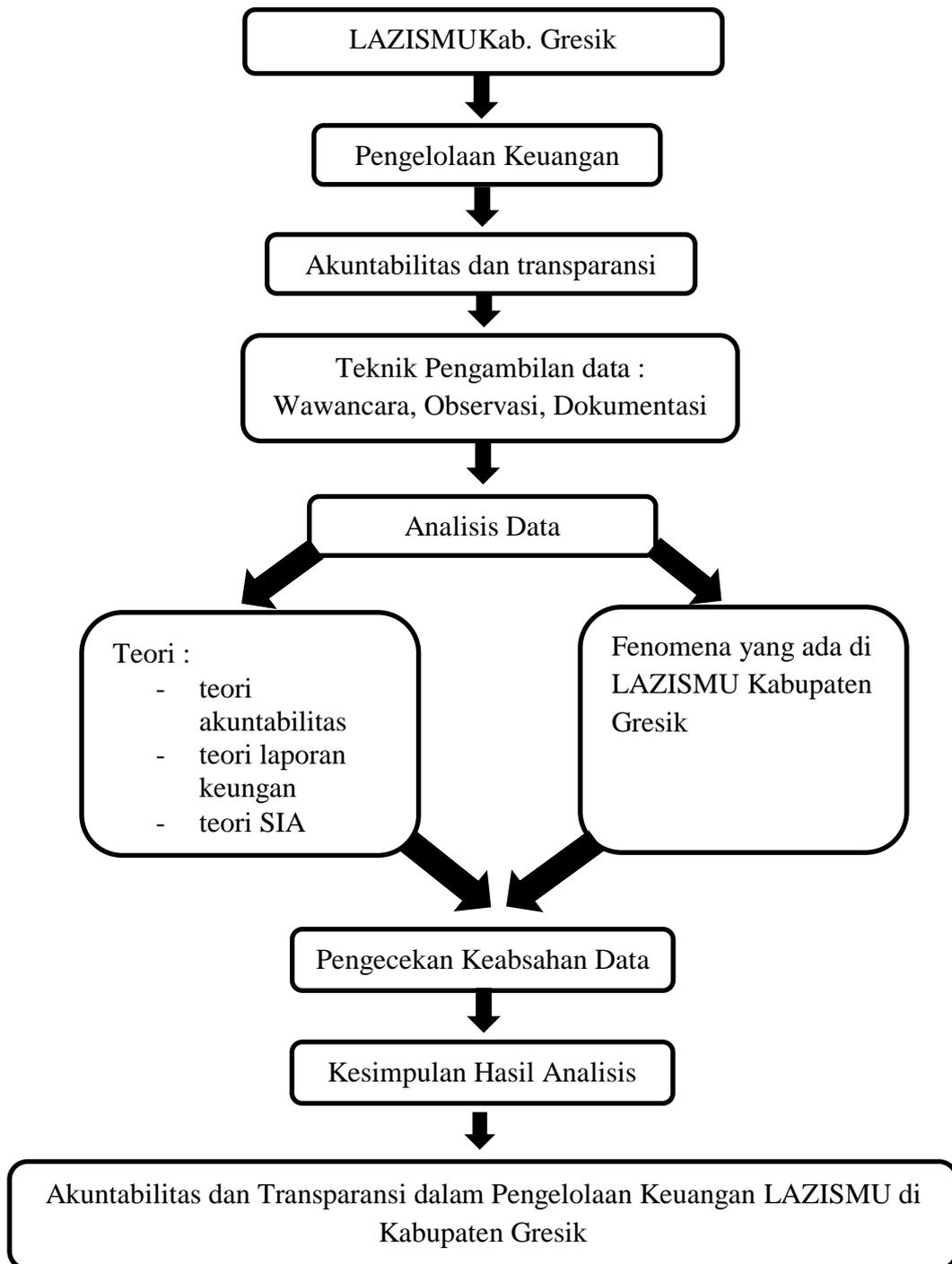
2.3 Proposisi Dan Rerangka Konseptual

Berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka Proposisi yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah :

Akuntabilitas di LAZISMU kabupaten Gresik, dalam hal transparansi keuangannya masih belum dapat dinilai maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kinerja pengurus LAZISMU. Dalam hal ini berkaitan dengan keuangan yang masih kurang transparan dikarenakan laporan keuangan yang mengetahui hanya sebatas dikalangan pengurus saja. Pada akhir bulan pelaporan juga masih menggunakan laporan keuangan sederhana belum mendetail dan terperinci.

Laporan keuangan di LAZISMU kabupaten Gresik, dalam proses pencatatannya LAZISMU sudah cukup modern dengan menggunakan sistem komputer sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Namun bentuk laporan keuangannya masih sederhana faktor ini dipengaruhi oleh pengetahuan para pengurus tentang bentuk laporan keuangan selama ini yang masih kurang, juga dikarenakan pengurus yang mayoritas belum pernah menempuh pendidikan Ekonomi terutama akuntansi secara akademik.

System informasi akuntansi di LAZISMU kabupaten Gresik, penerapannya sudah sangat baik terbukti dengan banyaknya program kerja yang sudah terfasilitasi dengan baik meski belum maksimal.



Gambar 2.1: Rerangka Konseptual Penelitian